

Perubahan Rencana Strategis Tahun 2017-2022



**Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD	7
2.1. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi	7
2.1.1. Tugas Pokok	7
2.1.2. Struktur Organisasi	22
2.2. Sumber Daya BPKAD	24
2.2.1. Sumber Daya Manusia	24
2.2.2. Sarana dan Prasarana	25
2.3. Kinerja Pelayanan BPKAD	27
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	45
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPKAD	47
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD	47
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	48
3.2.1. Visi Kota Tasikmalaya	48
3.2.2. Misi Kota Tasikmalaya	49
3.2.3. Tujuan dan Sasaran Kota Tasikmalaya	52
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat	57
3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan	57
3.3.2. Telaahan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat.....	59

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	61
3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah	61
3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	65
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	74
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	75
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	79
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF.....	82
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	123
BAB VIII PENUTUP.....	127

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
2.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan	24
2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan	24
2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	24
2.4	Perlengkapan Sarana Pendukung Kerja	25
2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Tahun 2018-2022	28
2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD Tahun 2018-2022	29
3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPKAD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	54
3.2	Telaahan Renstra Kementerian Keuangan	57
3.3	Permasalahan Pelayanan BPKAD Kota Tasikmalaya Berdasarkan Sasaran Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	59
3.4	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	66
3.5	Pemetaan Peran dan Capaian OPD dalam Pencapaian TPB.....	68
3.6	Korelasi Isu Strategis RPJMD dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	69
3.7	Korelasi Misi, Tujuan, dan Sasaran dengan TPB.....	70
3.8	Korelasi Program Pembangunan Daerah dengan TPB	70
3.9	Rekomendasi Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT)72	
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKAD Tahun 2018-2020	77
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKAD Tahun 2021-2022	78
5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	80
6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2018-2020	83
6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2021-2022	102
7.1	Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2018-2020 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022	123
7.2	Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2021-2022 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022	124
7.3	IKU BPKAD Tahun 2018-2020	124
7.4	IKU BPKAD Tahun 2021-2022	125

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1.1	Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Renstra menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang tertuang di dalam Renstra dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 melakukan perubahan tanpa mengubah visi utama pembangunan daerah. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD, terdapat beberapa indikator, target dan kinerja pembangunan daerah yang perlu dilakukan penyesuaian sehingga mampu mengatasi permasalahan pembangunan. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penyelarasan dokumen perencanaan dengan penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2017-2022 agar tercipta sinkronisasi, sinergitas dan harmonisasi dalam penetapan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan dengan Perubahan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Perubahan Renstra BPKAD Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 70);

27. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
28. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
30. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 55);
31. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 92).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra BPKAD yaitu menyediakan dokumen perencanaan yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra BPKAD yaitu menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja BPKAD serta sebagai pedoman dalam penyusunan Renja BPKAD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan BPKAD

Bab ini menjelaskan tentang tugas pokok dan struktur organisasi, sumber daya BPKAD, kinerja pelayanan BPKAD, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis BPKAD

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPKAD, telaahan visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Keuangan, telaahan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BPKAD dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BPKAD.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi indikator kinerja BPKAD yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPKAD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka perencanaan maupun pelaksanaannya dan rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPKAD

2.1. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

BPKAD mempunyai kedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas Pokok

Dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya, BPKAD mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sebagai arah dan pedoman yang jelas dalam penataan organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan, serta untuk menunjang koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan komunikasi kelembagaan secara internal, lebih lanjut dijabarkan tugas pokok masing-masing sub unit organisasi.

1. Kepala Badan

- 1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja badan.
- 2) Rincian Tugas Kepala Badan :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja badan;

- b. merumuskan dan menetapkan tujuan dan sasaran serta rencana strategis dan program kerja badan untuk mendukung visi dan misi daerah;
- c. menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah;
- d. menyelenggarakan pengelolaan aset daerah;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan sistem informasi keuangan dan aset daerah;
- g. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Badan;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit;
- i. melaksanakan koordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Badan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan umum.
- 2) Rincian tugas Sekretariat :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
 - b. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan badan;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, pelayanan publik dan ketatalaksanaan di lingkungan badan;
 - d. Menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang keuangan dan pengelolaan aset;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang keuangan dan pengelolaan aset;

- f. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja badan;
- g. Mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja badan;
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Sekretariat, membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- (a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (b) Melaksanakan ketatausahaan di lingkungan badan;
- (c) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan badan;
- (d) Melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan badan;
- (e) Melaksanakan pengelolaan aset milik daerah di lingkungan badan;
- (f) Mengelola kepegawaian di lingkungan badan;
- (g) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan public di lingkungan badan;
- (h) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (i) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- (j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

(1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

(2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :

- (a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian keuangan;
- (b) Melaksanakan penatausahaan keuangan;
- (c) Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan badan;
- (d) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
- (e) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- (f) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :
 - (a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - (b) Menyiapkan bahan penyusunan program kerja badan;
 - (c) Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program kerja;
 - (d) Melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
 - (e) Menyusun rencana strategis (Renstra);
 - (f) Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja);
 - (g) Menyusun Perjanjian Kinerja (PK);
 - (h) Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
 - (i) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Pegawai;
 - (j) Menyusun cascading dan pohon kinerja;
 - (k) Menyusun rencana aksi dan evaluasi rencana aksi;
 - (l) Menghimpun data sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
 - (m) Menghimpun data penyusunan program anggaran dalam rangka penyusunan perencanaan RKA, DPA dan DPPA;
 - (n) Menyusun laporan penyelenggaraan sistem pengendalian internal perangkat daerah (SPIP);

- (o) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- (p) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- (q) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Anggaran

- 1) Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan dan penyusunan anggaran pemerintah daerah.
- 2) Rincian tugas Bidang Anggaran :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Anggaran;
 - b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyusunan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. Menyelenggarakan penyiapan bahan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) dan perumusan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan (KUPA-PPASP);
 - d. Menyelenggarakan penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan anggaran dan perubahan APBD;
 - e. Menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan APBD serta pengesahannya;
 - f. Menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - g. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan penyusunan anggaran;
 - h. Penyiapan rencana dan rancangan peraturan daerah pembentukan dana cadangan, pinjaman daerah/hutang, penyertaan modal/ investasi dan pemberian pinjaman daerah;
 - i. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Anggaran;
 - j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Anggaran, membawahkan :

a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran

- (1) Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan anggaran.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Perencanaan Anggaran:
 - (a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - (b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS);
 - (c) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan (KUPA-PPASP);
 - (d) Menyiapkan bahan penyusunan regulasi bidang anggaran;
 - (e) Menyiapkan bahan dan koordinasi perencanaan anggaran pendapatan;
 - (f) Menyiapkan bahan dan koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah;
 - (g) Menyiapkan bahan dan koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan;
 - (h) Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan dalam perencanaan anggaran;
 - (i) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - (j) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - (k) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran

- (1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan anggaran.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran:
 - (a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - (b) Menghimpun, menyiapkan dan analisa bahan dalam rangka penyusunan APBD;

- (c) Melaksanakan review rencana anggaran RKA-SKPD/ Perubahan RKA-SKPD;
- (d) Melaksanakan penyusunan dan review DPA-SKPD/ DPPA-SKPD;
- (e) Menyiapkan bahan dan koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- (f) Menyiapkan bahan dan koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
- (g) Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- (h) Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- (i) Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan anggaran;
- (j) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran; dan
- (k) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

- 1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan kebijakan teknis perbendaharaan keuangan daerah.
- 2) Rincian tugas Bidang Perbendaharaan:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perbendaharaan;
 - b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan konsep petunjuk teknis perbendaharaan dan verifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mengelola kegiatan perbendaharaan keuangan daerah;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dalam penyelenggaraan perbendaharaan keuangan daerah;
 - e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Perbendaharaan;

- f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
- a. Sub Bidang Perbendaharaan I**
 - (1) Sub Bidang Perbendaharaan I mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan kas daerah.
 - (2) Rincian tugas Sub Bidang Perbendaharaan I:
 - (a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - (b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan belanja barang dan jasa serta belanja modal;
 - (c) Melaksanakan verifikasi untuk pengeluaran belanja barang dan jasa serta belanja modal;
 - (d) Menerbitkan SP2D belanja barang dan jasa serta belanja modal;
 - (e) Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan dalam kebendaharaan;
 - (f) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - (g) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - (h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan II**
 - (1) Sub Bidang Perbendaharaan II mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengelolaan belanja pegawai gaji dan tunjangan, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan pembiayaan.
 - (2) Rincian tugas Sub Bidang Perbendaharaan II:
 - (a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Perbendaharaan II;
 - (b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis belanja pegawai gaji dan tunjangan, belanja bunga, belanja subsidi,

- belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan pembiayaan;
- (c) Melaksanakan verifikasi untuk pengeluaran belanja pegawai gaji dan tunjangan, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan pembiayaan;
 - (d) Menerbitkan SP2D belanja pegawai gaji dan tunjangan, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja tidak terduga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan pembiayaan;
 - (e) Melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan bimbingan dalam kebendaharaan;
 - (f) Melaksanakan rekonsiliasi kewajiban daerah;
 - (g) Menatausahakan investasi daerah;
 - (h) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perbendaharaan II;
 - (i) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - (j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Kas Daerah

- (1) Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kas daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Kas Daerah:
 - (a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Kas Daerah;
 - (b) melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kas daerah;
 - (c) melaksanakan pengumpulan data realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - (d) menyiapkan anggaran kas;
 - (e) memeriksa ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas dan menerbitkan SPD;
 - (f) memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada kas daerah;

- (g) melaksanakan rekonsiliasi dan menyusun laporan data penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- (h) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Kas Daerah;
- (i) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- (j) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Akuntansi

- 1) Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan akuntansi keuangan daerah.
- 2) Rincian tugas Bidang Akuntansi:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Akuntansi;
 - b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan akuntansi keuangan daerah;
 - c. Menyelenggarakan kebijakan akuntansi keuangan daerah;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan kebijakan akuntansi keuangan daerah;
 - e. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
 - f. Menyelenggarakan pengelolaan tuntutan ganti rugi dan perbendaharaan;
 - g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Akuntansi;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja**
 - (1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan akuntansi pendapatan dan belanja.
 - (2) Rincian tugas Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja:
 - (a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;

- (b) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan akuntansi pendapatan dan belanja, penerimaan, pengeluaran, pembiayaan, transfer, piutang dan utang belanja;
- (c) Melaksanakan pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelaksanaan akuntansi pendapatan dan belanja, penerimaan, pengeluaran, pembiayaan, transfer, piutang dan utang belanja;
- (d) Melaksanakan pembinaan pengelolaan akuntansi pendapatan dan belanja;
- (e) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Akuntansi Pendapatan dan Belanja;
- (f) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- (g) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dan Perbendaharaan

- (1) Sub Bidang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dan Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan perbendaharaan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dan Perbendaharaan:
 - (a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dan Perbendaharaan;
 - (b) Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan tuntutan ganti rugi dan perbendaharaan;
 - (c) Menyusun dan menyiapkan bahan laporan tuntutan ganti rugi dan perbendaharaan;
 - (d) Melaksanakan penatausahaan kasus kerugian daerah;
 - (e) Memfasilitasi sidang dan/atau rapat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah;

- (f) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dan Perbendaharaan;
- (g) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- (h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah

- (1) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Pelaporan Keuangan Daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
 - (a) Melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
 - (b) Melaksanakan pengolahan data dan informasi laporan keuangan daerah;
 - (c) Melaksanakan konsolidasi laporan keuangan SKPKD dengan laporan SKPD;
 - (d) Melaksanakan penghimpunan dan rekonsiliasi laporan Keuangan Daerah;
 - (e) Menyiapkan bahan dan data tentang penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD;
 - (f) Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah;
 - (g) Mengkordinasikan SKPD untuk menyusun laporan semester, laporan keuangan prognosis dan laporan keuangan akhir tahun;
 - (h) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan berkaitan dengan tugas Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
 - (i) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - (j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Aset Daerah

- 1) Bidang Aset Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan kebijakan pengelolaan Barang Daerah.
- 2) Rincian tugas Bidang Aset Daerah:
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Aset Daerah;

- b. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan barang daerah;
 - c. Menyelenggarakan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pengelolaan barang daerah;
 - e. Menyelenggarakan penatausahaan neraca barang daerah dan investasi daerah;
 - f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Aset Daerah;
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Aset Daerah, membawahkan:
- 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pemindahtanganan Aset Daerah**
 - (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pemindahtanganan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan perihal perencanaan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
 - (2) Rincian tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pemindahtanganan Aset Daerah:
 - (a) Menyusun rencana program kerja Sub Bidang Perencanaan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
 - (b) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);
 - (c) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta analisis data mengenai perencanaan Barang Milik Daerah meliputi perencanaan pengadaan barang, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
 - (d) Melaksanakan kajian teknis analisis kebutuhan barang pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan kebutuhan dan penganggaran barang pemerintah daerah;
 - (e) Menyelenggarakan penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah;

- (f) Melaksanakan koordinasi dan/ atau pemantauan/ survey harga barang/ jasa dalam rangka merumuskan konsep penetapan standar harga satuan barang dan jasa kebutuhan pemerintah daerah;
- (g) Melaksanakan pembinaan, pengendalian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Pengadaan, RKBMD Pemeliharaan, RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan, dan RKBMD Penghapusan;
- (h) Melaksanakan penyusunan/ rekapitulasi RKBMD Pengadaan, RKBMD Pemeliharaan, RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan, dan RKBMD Penghapusan dari masing-masing SKPD menjadi RKBMD Pemerintah Daerah;
- (i) Menyelenggarakan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- (j) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pemindahtanganan Aset Daerah;
- (k) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- (l) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah

- (1) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemanfaatan dan pengamanan aset daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah:
 - (a) Menyusun rencana program Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
 - (b) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta pengolahan data basis Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan dan penyelenggaraan Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;

- (c) Melaksanakan pemeliharaan barang daerah yang berada dalam gudang induk daerah;
- (d) Menyelenggarakan penyimpanan dan pendistribusian barang milik daerah dalam rangka pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- (e) Menyelenggarakan penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah;
- (f) Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah;
- (g) Melaksanakan penyimpanan bukti kepemilikan barang milik daerah;
- (h) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
- (i) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- (j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah

- (1) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok tugas pokok tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penatausahaan aset daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah:
 - (a) Menyusun rencana program Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
 - (b) menyelenggarakan pelayanan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah;
 - (c) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - (d) menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan teknis dan pengendalian terhadap penatausahaan barang milik daerah yang diselenggarakan oleh SKPD;
 - (e) menyelenggarakan penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca dan atau penilaian kembali barang milik daerah;

- (f) melaksanakan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- (g) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
- (h) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- (i) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

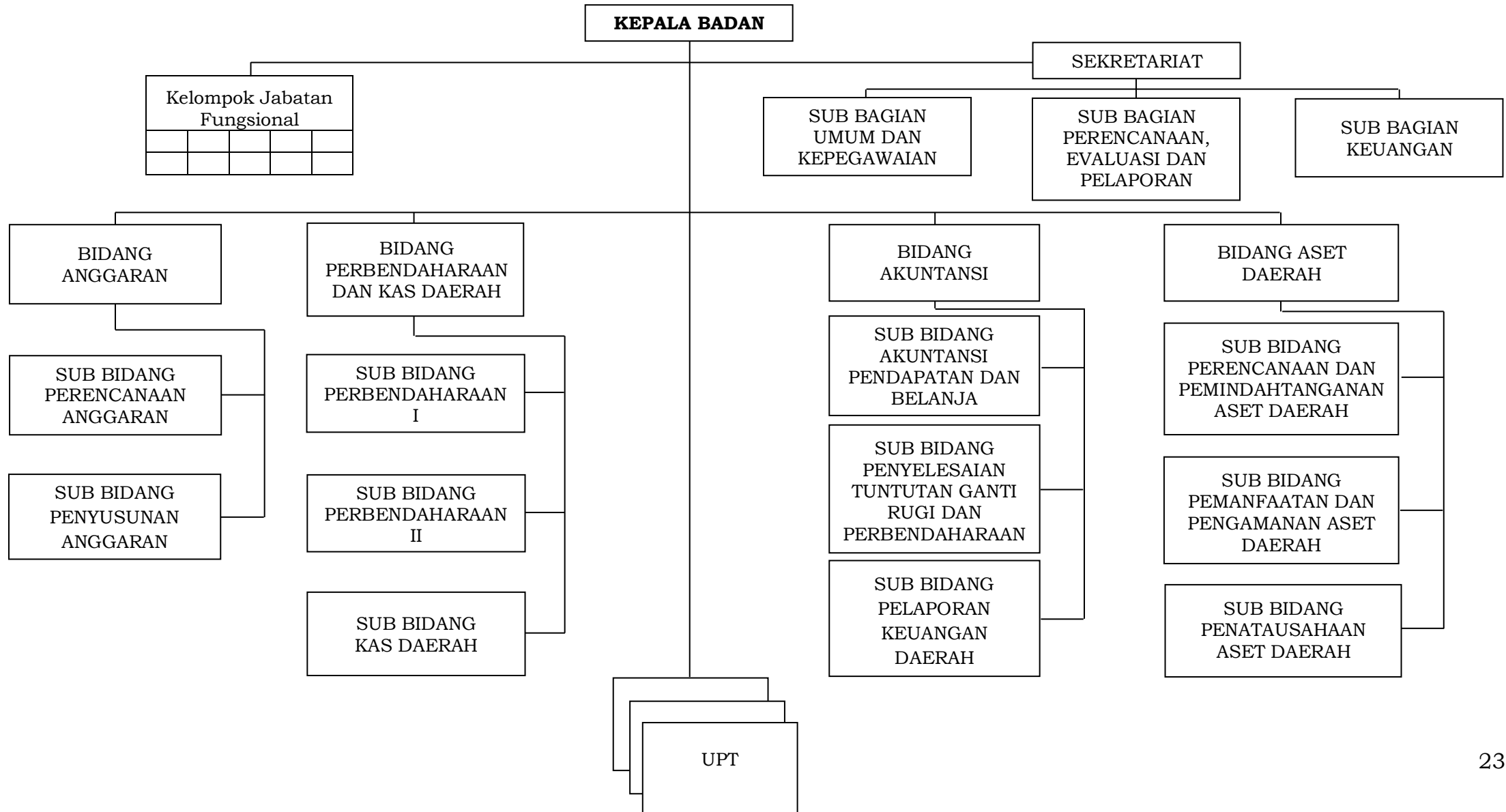
2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPKAD berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Anggaran membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran
 - b. Sub Bidang Penyusunan Anggaran
4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan I
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan II
 - c. Sub Bidang Kas Daerah
5. Bidang Akuntansi, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan Dan Belanja
 - b. Sub Bidang Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Dan Perbendaharaan
 - c. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah
6. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pemindahtanganan Aset Daerah
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah
 - c. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

GAMBAR 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH



2.2 Sumber Daya BPKAD

BPKAD memegang peranan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam rangka mendukung hal tersebut, diperlukan sumber daya manusia yang memenuhi kebutuhan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Komposisi Pegawai pada BPKAD sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020 dapat dilihat berdasarkan Kelompok Jabatan pada Tabel 2.1. dan berdasarkan Golongan pada Tabel 2.2. serta berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan

NO	KEL. JABATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Eselon II B	1	-	1
2	Eselon III A	-	1	1
3	Eselon III B	3	1	4
4	Eselon IV A	8	6	14
5	Pelaksana	19	17	36
6	Jabatan Fungsional (Arsiparis dan Pranata Komputer)	3	-	3
JUMLAH TOTAL		34	25	59

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Golongan IV	5	2	7
2	Golongan III	22	22	44
3	Golongan II	7	1	8
JUMLAH TOTAL		34	25	59

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	MAGISTER (S2)	5	5	10
2	SARJANA (S1)	19	17	36
3	D3	5	2	7
4	SLTA	5	1	6
5	SD	-	-	-
JUMLAH TOTAL		34	25	59

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Perlengkapan yang dimiliki oleh BPKAD yang merupakan sarana pendukung kerja sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perlengkapan Sarana Pendukung Kerja

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	6	Baik
2	Kendaraan Bermotor Berpenumpang Lain-lain	3	Baik
3	Sepeda Motor	17	Baik
4	Mesin Ketik Elektronik	2	Baik
5	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1	Baik
6	Lemari Besi	32	Baik
7	Rak Besi/Metal	41	Baik
8	Filling Besi/Metal	10	Baik
9	Band Kas	2	Baik
10	Lemari Kayu	1	Baik
11	Alat Penghancur Kertas	5	Baik
12	Papan Nama Instansi	55	Baik
13	Mesin Absensi	3	Baik
14	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain) Vertical Blind	9	Baik
15	Alat Kantor Lain - Lain (Kursi Putar)	54	Baik
16	Lemari Kayu	38	Baik
17	Rak Kayu	2	Baik
18	Meja Kayu/Rotan	2	Baik
19	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	4	Baik
20	Zice	1	Baik
21	Meja Rapat	39	Baik
22	Meja Reseption	3	Baik
23	Kursi Rapat	11	Baik
24	Kursi Tamu	3	Baik
25	Kursi Putar	91	Baik
26	Kursi Lipat	6	Baik
27	Meja Biro	46	Baik
28	Moubiler Lainnya (Penataan Ruang Lobi dan Ruang Rapat Lt. 3)	3	Baik
29	Mesin Penghisap Debu	3	Baik
30	Lemari Es	7	Baik
31	AC Unit	3	Baik
32	AC Split	11	Baik
33	Televisi	4	Baik

Tahun 2017-2022

34	Loudspeaker	9	Baik
35	Sound System	3	Baik
36	Wireless	1	Baik
37	Microphone	1	Baik
38	Unit Power Supply	3	Baik
39	Tangga Alumunium	1	Baik
40	Dispenser	7	Baik
41	Genset	1	Baik
42	Alat Pemadam Portable	3	Baik
43	Mainframe	1	Baik
44	Local Area Network (LAN)	1	Baik
45	Personal Komputer Lain-lain (Anti Virus, KVM, Switched, Wirelles Poin, Lan, Wire Cable)	1	Baik
46	P.C Unit	57	Baik
47	Lap Top	36	Baik
48	Note Book	1	Baik
49	Desktop	4	Baik
50	Hard Disk	17	Baik
51	Printer	1	Baik
52	Monitor	1	Baik
53	Printer	37	Baik
54	Scanner	1	Baik
55	External	5	Baik
56	Server	7	Baik
57	Hub	5	Baik
58	Hub/ Accses Point	2	Baik
59	Peralatan Jaringan Lain-lain (Hotspot Server with Managemen System Multi Core x86)	1	Baik
60	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
61	Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	Baik
62	Meja Operator	12	Baik
63	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
64	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	4	Baik
65	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Baik
66	Lemari Arsip	2	Baik
67	Camera + Attachment	13	Baik
68	Proyektor + Attachment	4	Baik
69	Microphone/Wireless Mic	5	Baik
70	Unintemuptible Power Supply (UPS)	10	Baik
71	Power Amplifier	1	Baik
72	Peralatan studio Visual Lain-lain (Direck/ Samson CTV 260 W)	3	Baik
73	Video Mixer	1	Baik
74	Power Supply	2	Baik
75	Lighting Stand Tripod	2	Baik

Tahun 2017-2022

76	Sound System	7	Baik
77	Handy Talky	12	Baik
78	Swicher/Patch Panel	1	Baik
79	Mixer	1	Baik
80	Stabilizer	3	Baik
81	Kabel Listrik	3	Baik
82	Scanner	3	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD

Kinerja pelayanan BPKAD diukur berdasarkan Target Renstra pada Tahun 2018 dan Tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut :

Tahun 2017-2022

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Tahun 2018-2022
Kota Tasikmalaya

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BPKAD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Capaian IKM Perangkat Daerah				82	85	89			83,43	85,37				101,74	100,44			
2	Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya				100	100	100			111,11	100,7				111,11	100,7			
3	Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP				100	100	100			100	100				100	100			
4	Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca				100	100	100			100	100				100	100			
5	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah				75	77	79			73,64	74,06				98,19	96,18			
6	Maturitas SPIP Perangkat Daerah				2	3	3			2	2,5				100	83,33			
7	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP				100	100	100			100	100				100	100			

Tahun 2017-2022

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD Tahun 2018-2022
Kota Tasikmalaya

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<i>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan</i>	10.586.093.300	9.166.107.381	5.750.014.626			8.865.191.411	8.562.317.739									-25,34%	-3,42%
<i>Program Peningkatan Pelayanan Publik</i>		10.000.000	2.000.000				9.346.280									-40,00%	
Penyusunan SOP tentang Pelayanan Publik Pengelolaan Keuangan/ Aset Daerah		5.000.000					4.434.340									-50,00%	
Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik		5.000.000	2.000.000				4.911.940									-30,00%	

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

Penyediaan Alat Tulis Kantor	88.228.000	81.000.000	26.151.300			63.155.400	80.924.925												-37,95%	28,14%	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	85.000.000	72.600.000	24.685.000			65.316.680	72.328.465													-40,29%	10,74%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	15.000.000	10.000.000			9.995.200	14.998.750													8,33%	50,06%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	77.000.000	79.200.000	31.000.000			73.522.900	79.127.180													-29,00%	7,62%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.600.000	15.000.000				41.208.200	13.464.000													-82,80%	-67,33%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.000.000	24.000.000	20.000.000			13.860000	23.990.000													-8,33%	73,09%

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	475.000.000	300.000.000	365.000.000			368.957.300	265.756.500											-7,59%	-27,97%	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	10.000.000	45.000.000					31.735.000												125,00%	
Pengadaan Meubelair	105.000.000					86.784.500													-50,00%	-100,00%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	480.000.000	190.000.000	163.000.000			449.907.000	189.568.775												-37,31%	-57,86%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	188.050.000	151.875.000	142.467.400			89.685.000	123.570.900												-12,72%	37,78%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	129.760.000	132.945.000	113.472.600			105.559.146	126.258.049												-6,10%	19,61%

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	91.720.000	123.600.000	97.300.000			36.625.205	58.196.190								6,74%	58,90%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	20.000.000	25.000.000													-37,50%	
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	80.400.000	28.000.000			13.140.000	27.910.100								-15,59%	112,41%
Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	45.000.000	45.000.000	19.600.000			25.855.000	28.710.000								-28,22%	11,04%
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	976.000.000	166.027.000	100.060.000			934.475.694	134.970.000								-61,36%	-85,56%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	40.400.000	45.000.000				28.256.250	36.179.000								-44,31%	28,04%

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	40.400.000	45.000.000				28.256.250	36.179.000											-44,31%	28,04%	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000																		-50,00%	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	20.000.000																		-50,00%	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.666.223.300	4.123.180.800	2.334.260.000			3.584.627.209	4.035.064.685												-15,46%	12,57%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	184.030.000	212.830.000	92.399.000			178.172.646	209.411.151												-20,47%	17,53%
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	119.000.000	122.960.000	100.467.500			116.344.467	120.380.084												-7,48%	3,47%

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	195.230.000	215.840.000	100.282.000			191.378.628	214.911.141													-21,49%	12,30%
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	102.800.000	133.300.000	94.032.000			102.342.353	131.160.582													0,11%	28,16%
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	75.010.000	101.260.000	81.026.000			74.908.080	100.267.890													7,51%	33,85%
Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	164.330.000	138.330.000	124.155.000			163.837.754	136.765.388													-13,03%	-16,52%
Verifikasi Dokumen Anggaran	107.019.000	99.730.000	105.515.000			106.755.410	98.949.970													-0,51%	-7,31%
Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah	102.845.000	86.510.000	50.789.500			102.716.660	85.744.695													-28,59%	-16,52%

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

Penyusunan Laporan Daftar Transaksi Harian Perangkat Daerah	60.000.000		27.000.000			59.974.000												-50,00%	-100,00%	
Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya	170.000.000	170.000.000	132.500.000			164.466.731	169.469.487												-11,03%	3,04%
Pelaporan Pajak Orang Pribadi	70.000.000					69.330.815													-50,00%	-100,00%
Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji	60.000.000	107.329.760	51.750.000			59.577.950	106.432.185												13,55%	78,64%
Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	75.000.000	200.000.000	63.669.000			70.868.710	199.704.050												49,25%	181,79%
Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik	45.833.300	50.000.000				45.807.405	49.539.200												-45,45%	8,15%

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	255.000.000	525.000.000	98.000.000			252.615.000	520.080.000								12,27%	105,88%
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK Perangkat Daerah dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua	200.000.000	32.000.000	21.074.000			198.097.269	30.939.425								-59,07%	-84,38%
Review Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah		50.000.000					48.905.920								-50,00%	
Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	150.000.000	140.000.000				148.701.185	138.895.699								-53,33%	-6,59%
Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah	1.947.696.000	1.407.049.121	1.250.363.326			1.543.586.811	1.327.890.049								-19,45%	-13,97%
Pembuatan Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya (Protasik)		106.000.000	16.500.000				104.951.000								-42,22%	

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	56.831.000	60.450.000	17.219.700			55.992.559	59.734.584											-32,57%	6,68%	
Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	349.696.000	269.700.000				326.443.745	261.895.328												-61,44%	-19,77%
Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	255.966.000	171.361.957	135.000.000			190.267.082	151.954.836												-27,14%	-20,14%
Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah	226.830.000	408.650.000	461.005.000			163.565.200	405.378.378												46,48%	147,84%
Pengamanan Aset / Barang Milik Daerah	362.534.000	265.887.164	167.128.626			199.333.650	224.981.841												-31,90%	12,87%
Penilaian Barang Milik Daerah	155.230.000	125.000.000	53.510.000			135.336.550	118.994.082												-38,33%	-12,08%

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah	75.000.000					73.344.000													-50,00%	-100,00%	
Pengadaan Aset/ Barang Milik Daerah			400.000.000																	0,00%	
Sensus Barang Milik Daerah	465.609.000					399.304.025														-50,00%	-100,00%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	65.000.000	65.000.000	20.000.000			61.155.800	63.494.730													-34,62%	3,82%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	10.000.000	5.000.000			14.749.800	9.338.900													-41,67%	-36,68%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	30.000.000	30.000.000	5.000.000			29.782.000	29.882.900													-41,67%	0,34%

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	5.000.000			16.624.000	19.776.350												-37,50%	18,96%
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah		5.000.000	5.000.000				4.496.580												0,00%	
Program Perencanaan Kerja	41.400.000	30.000.000	20.000.000			39.964.680	29.738.200												-30,43%	-25,59%
Penyusunan Rencana Kerja	10.000.000	10.000.000	2.000.000			9.531.900	9.921.200												-40,00%	4,08%
Penyusunan Rencana Strategis	10.000.000					9.664.500													-50,00%	-100,00%
Penyusunan Perubahan Rencana Strategis			5.000.000																0,00%	
Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	21.400.000	20.000.000	13.000.000			20.768.280	19.817.000												-20,77%	-4,58%

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

Program Pemanfaatan Informasi	Optimalisasi Teknologi	10.000.000					10.000.000											-50,00%	-100,00%	
Pengelolaan Website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		10.000.000					10.000.000												-50,00%	-100,00%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam upaya menjalankan amanah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta perannya sebagai regulator dalam bidang fiskal, Kementerian keuangan mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan perumusan kebijakan fiskal. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan yang harus diwaspadai agar tidak mengganggu proses pelayanan serta dalam proses perumusan kebijakan fiskal.

Beberapa potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh kementerian keuangan dikelompokkan dalam 6 tema besar yaitu kebijakan fiskal, pendapatan, Belanja, pembiayaan, kekayaan negara dan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan. Dari 6 tema tersebut, BPKAD menitikberatkan pada satu tema sebagai bahan analisis renstra BPKAD yaitu tema reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan yang berisi :

- a. Setelah berhasilnya melaksanakan program reformasi birokrasi, Kementerian keuangan membuat program lanjutan yang diberi nama Transformasi kelembagaan, yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang modern. Cetak biri Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan telah ditetapkan dalam KMK Nomor 36KMK.01/2014;
- b. Komitmen pimpinan yang tinggi dalam mengawal implementasi reformasi birikrasi dan transformasi kelembagaan;
- c. Kementerian keuangan telah menetapkan sistem manajemen kinerja berbasis Balanced score card (BSC), manajemen resiko, membentuk unit kepatuhan internal dan sistem pencegahan dan penindakan korupsi.

Selain harus selaras dengan Renstra K/L, Renstra BPKAD juga harus sejalan dengan Renstra Provinsi Jawa Barat. Dalam Renstra BPKAD Propinsi Jawa Barat terdapat peluang dan tantangan yang menjadi perhatian BPKAD Kota Tasikmalaya, adapun tantangan dan peluang tersebut adalah:

- 1) Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan BPKAD Propinsi Jawa Barat adalah :
 - a. Masyarakat dan SKPD terkait semakin kritis dan menuntut kualitas pelayanan secara prima dan bebas dari tindakan penyelewengan;
 - b. Perkembangan dan penerapan teknologi informasi yang semakin tinggi dalam mendukung pelayanan prima;
 - c. Tuntutan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- 2) Sedangkan Peluang yang dimiliki BPKAD Propinsi Jabar adalah:
- a. Komitmen Pimpinan yang sangat kuat dalam upaya peningkatan pelayanan BPKAD dalam seluruh aspek pelayanan;
 - b. Kualitas & Kapabilitas pegawai pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan secara optimal;
 - c. Peran Strategis BPKAD dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. Tersedianya sumber daya keuangan dan aset daerah dalam pengembangan pelayanan.

Mengacu pada pada hal tersebut serta tugas pokok dan fungsi, BPKAD dapat dikatakan sangat berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses anggaran hingga pertanggungjawaban APBD, mulai dari proses perencanaan aset hingga pelaporannya, dalam era globalisasi ini peran penting tersebut harus didukung dengan penggunaan teknologi informasi yang dapat membantu percepatan dan ketepatan proses pengelolaan keuangan dan aset daerah serta transparansi yang menjadi tuntutan masyarakat.

Berkaitan dengan hal diatas, maka BPKAD Kota Tasikamalaya harus mempersiapkan diri untuk mengatasi tantangan berupa :

- a. Masyarakat dan Perangkat Daerah yang semakin kritis dan menuntut kualitas pelayanan secara prima;
- b. Perkembangan dan penerapan teknologi informasi yang semakin tinggi dalam mendukung pelayanan prima;
- c. Tuntutan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam menghadapi tantangan terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan sehingga tantangan yang ada dapat diatasi. Adapun peluang yang dimiliki oleh BPKAD adalah:

- a. Komitmen Pimpinan yang sangat kuat dalam upaya peningkatan pelayanan BPKAD dalam seluruh aspek pelayanan;
- b. Kualitas & Kapabilitas pegawai pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan secara optimal;
- c. Peran strategis BPKAD dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Tersedianya sumber daya keuangan dan aset daerah dalam pengembangan pelayanan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BPKAD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sebagai Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, banyak menemukan kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan ini dapat ditemui dalam pelaksanaan pelayanan berdasarkan Tugas dan Fungsi di masing-masing Bidang sebagai Unit Kerja di Lingkup BPKAD. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut akan teridentifikasi isu-isu strategis yang akan berpengaruh pada perkembangan kinerja dan dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam terhambatnya kinerja Badan, untuk segi positifnya keinginan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi faktor pendorong sehingga akan teridentifikasi pula potensi-potensi yang ada.

Berikut ini berbagai permasalahan yang masih ditemui dalam menjalankan tugas dan fungsi BPKAD sebagai pengelola keuangan dan aset daerah :

1. Kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/ perangkat daerah terkait, belum maksimal dan belum sepenuhnya menggunakan teknologi informasi;
2. Belum optimalnya perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja BPKAD;
3. Integritas, kompetensi, disiplin, dan kinerja aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang masih perlu ditingkatkan;
4. Pelaksanaan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum maksimal;
5. Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset daerah;
6. Belum maksimalnya pensertifikatan aset tetap tanah;
7. Belum optimalnya penatausahaan barang milik daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengacu kepada visi misi serta program prioritas yang dikampanyekan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2017-2022 dan mempertimbangkan kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran untuk pembangunan jangka menengah daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017 -2022.

3.2.1 Visi Kota Tasikmalaya

Visi dapat diartikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus mampu menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi yang dirumuskan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan untuk periode tahun 2017-2022 adalah:

“KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI”

Visi tersebut mengandung makna :

Religius : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya dengan keikhlasan hati dan dengan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai dan norma serta kearifan lokal.

Maju : suatu kondisi, sikap dan perilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang kreatif, produktif, inovatif, dan berdaya saing, disiplin, berpendidikan tinggi, sehat lahir dan batin, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat dengan toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan serta ditunjang oleh

infrastruktur dasar perkotaan yang memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan

Madani : suatu kondisi, sikap dan prilaku masyarakat Kota Tasikmalaya yang sejahtera, maju, beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis.

Dari penjabaran makna visi di atas, secara umum visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya berkeinginan untuk mencapai suatu kondisi, sikap dan prilaku yang mempunyai kedalaman penghayatan, pengamalan keagamaan dan keyakinannya terhadap Alloh SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang diwujudkan dengan mematuhi segala perintah dan menjauhi larangan-Nya, dengan keikhlasan hati dan seluruh jiwa raga serta memperhatikan tata nilai, norma dan kearifan lokal, mempunyai sikap disiplin, produktif, inovatif, dan berdaya saing, berpendidikan tinggi, sehat, dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, bergotong royong, rasional, arif, adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan, beradab dalam membangun, menjunjung tinggi etika dan moralitas, taat hukum dan demokratis. Sehingga terwujud kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batin, memperoleh ketenangan, aman, damai dan makmur dalam menjalani kehidupannya yang ditunjang oleh pelayanan dan infrastruktur dasar perkotaan yang baik, memadai, nyaman, bersih dan berwawasan lingkungan. Dengan adanya penetapan visi ini, diharapkan seluruh stakeholder dan komponen yang ada di Kota Tasikmalaya dapat bekerja sama bahu-membahu untuk memaksimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya, agar visi tersebut dapat kita capai dan wujudkan.

3.2.2 Misi Kota Tasikmalaya

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan

ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal;
2. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat;
3. Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
4. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi ke-1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal

Misi ini dimaksudkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya adalah masyarakat religius yang senantiasa menjunjung tinggi harkat, martabat dan kemuliaan serta berpegang teguh pada tata nilai, norma, moral dan agama serta memiliki akhlak dan karakter yang baik dan mulia. Menjaga dan memelihara kearifan lokal dan kebudayaan daerah yang baik dan luhur.

Misi ke-2 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat

Misi ini dimaksudkan untuk terus mendorong upaya penanggulangan kemiskinan dengan memberikan fasilitasi, pendampingan dan penguatan yang terus menerus kepada masyarakat miskin, meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Memperkuat kondisi perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, mengendalikan inflasi dan mengurangi kesenjangan, pengurangan pengangguran memperkuat daya saing pelaku usaha mikro dan kecil dalam rangka penguatan sistem ekonomi kerakyatan yang berbasis kekuatan dan potensi lokal,

peningkatan sarana prasarana perekonomian, membuka investasi dan lapangan kerja serta kesempatan berusaha, peningkatan akses untuk permodalan dan pemasaran, sehingga kondisi perekonomian dan daya beli serta daya saing masyarakat meningkat, tumbuh dan merata.

Misi ke-3 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Misi ini dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar perkotaan harus berkembang, merata dan berkelanjutan diseluruh wilayah, menyediakan infrastruktur publik yang representatif, aman, nyaman sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), ramah terhadap lingkungan, anak, disabilitas dan lansia. Infrastruktur yang mampu menunjang terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi terutama pada sentra – sentra industri kecil dan menengah, pusat perdagangan dan jasa, dengan tidak meninggalkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta didukung oleh formulasi dan sesuai dengan penataan ruang yang baik.

Misi ke-4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu ditunjang oleh upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, terpenuhinya pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui pendekatan keluarga yang kuat, bahagia dan sejahtera terutama dalam urusan pendidikan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan minimal.

Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi ini dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

3.2.3 Tujuan dan Sasaran Kota Tasikmalaya

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Misi ke-1 : Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal

Misi ke-1 mempunyai 2 tujuan dan 2 sasaran, yaitu :

T1. Terwujudnya tata nilai kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dan religius, dengan sasaran :

S1. Meningkatnya kerukunan dan karakter masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

T2. Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah, dengan sasaran :

S2. Meningkatnya apresiasi terhadap kesenian dan kebudayaan daerah.

Misi ke-2 : Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat

Misi ke-2 mempunyai 2 tujuan dan 4 sasaran, yaitu :

T.3. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, dengan sasaran:

S3. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masyarakat.

T.4. Menguatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, dengan sasaran :

S4. Meningkatnya peranan koperasi, usaha mikro kecil, industri perdagangan dan jasa;

S5. Meningkatnya lapangan kerja dan kesempatan berusaha;

S6. Meningkatnya pertanian dan ketahanan pangan daerah.

Misi ke-3 : Memantapkan infrastruktur dasar perkotaan guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan

Misi ke-3 mempunyai 1 tujuan dan 3 sasaran, yaitu :

- T5. Tersedianya infrastruktur dasar perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman, inklusif dan berkelanjutan, dengan sasaran :
- S7. Meningkatnya layanan infratraktur jalan yang mantap, aman, nyaman dan inklusif;
 - S8. Meningkatnya kualitas permukiman dan lingkungan yang nyaman dan sehat;
 - S9. Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang keberlanjutan sesuai tata ruang wilayah.

Misi ke-4 : Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ke-4 mempunyai 2 tujuan dan 3 sasaran, yaitu :

- T6. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat, dengan sasaran :
- S10. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan;
 - S11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - S12. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olahraga;
 - S13. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- T7. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pengendalian penduduk, dengan sasaran :
- S14. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender.

Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Misi ke-5 mempunyai 1 tujuan dan 2 sasaran, yaitu :

- T8. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi, dengan sasaran :
- S15. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
 - S16. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.

Tahun 2017-2022

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPKAD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
M5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
	T.8. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi.	Masih terjadi Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang keluar dari Ketentuan yang berlaku.	Perkembangan regulasi/ peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dinamis.	Adanya perubahan Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan perubahan Ketentuan yang berlaku.

Tahun 2017-2022

S.15. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik berbasis teknologi informasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis teknologi informasi belum optimal. 2. Belum maksimalnya peningkatan kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja BPKAD yang transparan dan akuntabel. 3. Belum optimalnya pengendalian internal BPKAD secara berjenjang terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi serta pengelolaan keuangan dan aset daerah. 2. Kurangnya sumber daya aparatur dalam bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 3. Masih kurangnya pemahaman tentang Sistem Pengendalian Internal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan terhadap penggunaan teknologi informasi. 2. Pelaksanaan pelatihan/ bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah. 3. Adanya pembinaan secara terus menerus dari perangkat daerah terkait tentang Perencanaan, SAKIP dan SPIP.
S.16. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dapat melebihi batas waktu yang ditetapkan. 2. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat tidak sesuai SAP. 3. Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya belum semua memiliki sertifikat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsolidasi dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Legislatif dan Perangkat Daerah terkait belum maksimal. 2. Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan hubungan kerja yang baik dengan DPRD dan Perangkat Daerah memudahkan untuk berkoordinasi. 2. Terintegrasinya sistem informasi perencanaan pembangunan,

Tahun 2017-2022

			<p>pembangunan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset daerah.</p> <p>3. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas.</p> <p>4. Belum maksimalnya pensertifikatan aset tetap tanah.</p> <p>5. Belum optimalnya penatausahaan barang milik daerah.</p>	<p>penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset daerah.</p> <p>3. Adanya kegiatan bimbingan teknis kepada Bendahara Pengeluaran di Perangkat Daerah tentang pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>4. Koordinasi yang baik dengan Pihak BPN.</p> <p>5. Adanya kegiatan bimbingan teknis kepada Pengurus Barang Pengguna di Perangkat Daerah tentang penatausahaan barang milik daerah.</p> <p>6. Pelaksanaan rekonsiliasi pengelolaan barang milik daerah.</p>
--	--	--	--	--

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat**3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan**

Tabel 3.2
Telaahan Renstra Kementerian Keuangan

No	Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian Keuangan tahun 2015-2019	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
V	Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21			
M1	Menetapkan kebijaksanaan Nasional dan memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam upaya : 1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat. 2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent. 3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan resiko minimum. 4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif. 5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif, mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa			

Tahun 2017-2022

	<p>S.1. Terjaganya defisit anggaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas • Hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang adil dan transparan • Pengelolaan kekayaan negara yang optimal • Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal • Organisasi yang It for purpose • SDM yang kompetitif • Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kementerian • Sistem informasi manajemen yang terintegrasi 	<p>Selalu dihadapkan dengan masalah aspek kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang mendasarinya</p>	<p>Kurang optimalnya pengetahuan tentang keuangan pemerintahan dan terbatasnya SDM yang dimiliki</p>	<p>Adanya tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan</p>
--	--	---	--	--

Tahun 2017-2022

3.3.2 Telaahan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan BPKAD Kota Tasikmalaya berdasarkan Sasaran Renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Misi, Tujuan dan Sasaran BPKAD Propinsi Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
V	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel			
M1	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota			
	T.1. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang handal dan terintegrasi berbasis teknologi informasi serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah kab/kota yang akuntabel dan taat asas	Masih terjadi Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang keluar dari Ketentuan yang berlaku.	Perkembangan regulasi/ peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dinamis.	Adanya perubahan Peraturan Daerah/ Peraturan Walikota tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan perubahan Ketentuan yang berlaku.
	S.1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah			
M2	Meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik daerah			

Tahun 2017-2022

	T.2. Mewujudkan manajemen pengelolaan barang daerah yang tertib optimal yang terintegrasi berbasis teknologi informasi			
	S.2. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah			
M3	Meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan dan barang daerah			
	T.3. Mewujudkan manajemen pengelolaan SDM keuangan dan barang milik daerah yang profesional dan kompeten	Masih kurangnya SDM pengelola keuangan yang mempunyai kompetensi di bidang pengelolaan keuangan	Kurangnya jumlah SDM secara keseluruhan di Kota Tasikmalaya	BPKAD sebagai lembaga yang mempunyai peran strategis
	S.3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah			

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031.

Lingkup RTRW Kota Tasikmalaya meliputi Wilayah Kota dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan dan 69 (enam puluh sembilan) kelurahan, mencakup seluruh wilayah daratan seluas kurang lebih 18.385 Ha (delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh lima hektar) beserta ruang udara di atasnya dan ruang di bawah bumi.

Tujuan penataan ruang di Wilayah Kota adalah mewujudkan ruang Kota Tasikmalaya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Priangan TimurPangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri kreatif termaju di Jawa Barat.

1. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

- 1) Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:
 - a. Pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa;
 - b. Peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan; dan
 - c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum.
- 2) Kebijakan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. Menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang; dan
 - b. Mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala regional.
- 3) Kebijakan peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat-pusat pelayanan;
 - b. Mengembangkan jalan lingkar dalam (*inner ring road*) dan jalan lingkar luar (*outer ring road*);
 - c. Meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pelayanan;
 - d. Mengembangkan sistem transportasi massal;
 - e. Meningkatkan fungsi terminal angkutan umum; dan
 - f. Meningkatkan integrasi sistem antar moda transportasi.
- 4) Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
- a. Mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan;
 - b. Mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - c. Mengembangkan prasarana sumber daya air;
 - d. Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik- teknik yang berwawasan lingkungan;
 - e. Meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
 - f. Mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.

2. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

- 1) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. Peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
 - b. Pelestarian kawasan cagar budaya; dan
 - c. Penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota.
- 2) Kebijakan peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. Menetapkan kawasan yang berfungsi lindung;
 - b. Mengembalikan fungsi kawasan yang berfungsi lindung yang telah menurun; dan
 - c. Meningkatkan konservasi kawasan yang berfungsi lindung.

- 3) Kebijakan pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. Menetapkan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi sebagai kawasan cagar budaya; dan
 - b. Memelihara kelestarian kawasan cagar budaya.
- 4) Kebijakan penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang telah ada;
 - b. Menetapkan persyaratan penyediaan RTH pada setiap fungsi kegiatan;
 - c. Mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi; dan
 - d. Mengembangkan pola-pola kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.
- 5) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi:
 - a. Pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. Pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien.
- 6) Kebijakan pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. Mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di kawasan pinggiran pusat kota; dan
 - b. Mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota.
- 7) Kebijakan pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota; dan
 - b. Menerapkan insentif dan disinsentif.

3. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

- 1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis meliputi:
 - a. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

- b. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup;
 - c. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - d. Pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- 2) Kebijakan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
- a. Menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa skala regional;
 - b. Pengembangan kawasan industri dan pergudangan skala regional;
 - c. Pengembangan sentra bisnis baru; dan
 - d. Pengembangan dan penataan sentra-sentra produksi pertanian dan industri kecil dan menengah.
- 3) Kebijakan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
- a. Mengatur pemanfaatan kawasan konservasi dengan memadukan perlindungan lingkungan hidup dan pengembangan kawasan; dan
 - b. Mengintegrasikan fungsi pelestarian lingkungan hidup dengan fungsi-fungsi lainnya tanpa mengganggu fungsi utama kawasan.
- 4) Kebijakan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
- a. Menetapkan kawasan strategis pendidikan; dan
 - b. Mengintegrasikan kegiatan sosial budaya dengan fungsi-fungsi penunjangnya dan/atau fungsi-fungsi lain yang terkait.
- 5) Kebijakan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Menata kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
- b. Mengoptimalkan fungsi kawasan dengan mengintegrasikan fungsi pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi komersial tanpa mengganggu fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara KLHS, KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Salah satu KRP yang wajib disusun KLHS adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD. Pasal 2 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD.

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dirancang oleh PBB dengan jumlah tujuan (goals) sebanyak 17 poin. Sistem TPB ini diimplementasikan di Indonesia dengan pengembangan menjadi 169 target dan 319 indikator yang dibagi sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota.

Tahun 2017-2022

Tabel 3.4
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

No. TPB	TPB
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta

Tahun 2017-2022

	Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

TPB Nomor 14 yaitu Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan tidak dimasukkan dalam analisis karena keseluruhan indikatornya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Tahun 2017-2022

Tabel 3.5
Pemetaan Peran dan Capaian OPD dalam Pencapaian TPB

No. TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Indikator Kinerja PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	OPD yang Menangani	Kriteria Pencapaian							
					SS	SP	SB	KPP	KPS	BS	NA	
16	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah								1
16	16.6.1.(a)	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan.	Opini BPK	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah								1
16	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1							
16	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah								1

Tahun 2017-2022

17	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah							1
----	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Tabel 3.6
Korelasi Isu Strategis RPJMD dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No.	Isu Strategis RPJMD	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
1	Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel menjadi isu strategis, yang ditandai oleh masih kurangnya kualitas dan kuantitas ASN, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dan kinerja aparatur mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, belum optimalnya fungsi pengawasan dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), belum optimalnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas instansi pemerintah, masih terdapat beberapa gedung kantor perangkat daerah yang belum representatif, masih belum optimalnya implementasi egovernment pada seluruh perangkat daerah.	Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan. Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Tahun 2017-2022

Tabel 3.7
Korelasi Misi, Tujuan, dan Sasaran dengan TPB

Misi	Tujuan dan Sasaran	TPB
Misi ke-5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	T8. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi, dengan sasaran: S15. Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi S16. Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan. Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Tabel 3.8
Korelasi Program Pembangunan Daerah dengan TPB

No.	Program Pembangunan Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung jawab dan Pendukung	TPB
1	Program Tasik Bersedekah	Program Fasilitasi Tasik Bersedekah	Seluruh Perangkat Daerah	Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

Tahun 2017-2022

2	Program Tasik Layanan Prima (Profesional, Inovatif dan Memuaskan)	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Seluruh Perangkat Daerah	Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.
3	Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur • Program Peningkatan Disiplin Aparatur • Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur • Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur • Program Perencanaan Kerja 	Seluruh Perangkat Daerah	Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

Tahun 2017-2022

	<ul style="list-style-type: none"> • Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah 	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.
--	---	--	---

Tabel 3.9
Rekomendasi Berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT)

No. TPB	No. Indikator	Indikator TPB	Isu Strategis	Rekomendasi	OPD yang Menangani
16	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.		Melakukan penghitungan proporsi pengeluaran utama terhadap anggaran yang disetujui per tahun.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
16	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).		1. Mempertahankan predikat WTP; 2. Mempertahankan program dan kinerja di Pemerintah Kota Tasikmalaya.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
16	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).		1. Meningkatkan pemahaman terhadap SKIP di Seluruh OPD; 2. Mempertahankan program dan kinerja;	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

				3. Melakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran.	
16	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.		1. Mempertahankan program dan kinerja; 2. Melakukan evaluasi untuk mencapai titik optimum penggunaan anggaran.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategi. Telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah terpilih serta visi misi BPKAD Propinsi Jawa Barat. Sumber isu strategis dari lingkungan eksternal seperti masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Dengan memperhatikan semua sumber tersebut, maka BPKAD melihat bahwa permasalahan yang akan menjadi isu strategis BPKAD adalah:

1. Kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/perangkat daerah terkait, belum maksimal dan belum sepenuhnya menggunakan teknologi informasi;
2. Belum optimalnya perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja BPKAD;
3. Integritas, kompetensi, disiplin, dan kinerja aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang masih perlu ditingkatkan;
4. Pelaksanaan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan belum maksimal;
5. Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset daerah;
6. Belum maksimalnya pensertifikatan aset tetap tanah;
7. Belum optimalnya penatausahaan barang milik daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Adapun tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAD Kota Tasikmalaya yaitu tujuan ke delapan dari misi kelima yaitu terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi, dengan sasaran :

1. Sasaran ke-15 yaitu Meningkatnya kualitas Pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Strategi :

Meningkatkan pelayanan publik yang profesional, inovatif dan memuaskan berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan melalui Program Tasik Layanan Prima.

Kebijakan :

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur, penguatan kelembagaan serta penyediaan sarana prasarana yang memadai;
- 2) Percepatan penerapan sistem dan teknologi informasi pada semua layanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik.

2. Sasaran ke-16 yaitu Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah.

Strategi :

Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Kinerja Keuangan dan Aparatur yang berorientasi pada hasil dan kinerja.

Kebijakan :

- 1) Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah yang inovatif dan partisipatif, penganggaran dan penatausahaan keuangan dan aset daerah yang proporsional, efektif efisien, transparan dan akuntabel;
- 2) Peningkatan pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan pembangunan yang transparan dan akuntabel, serta memacu peningkatan PAD untuk mendukung pendanaan pembangunan daerah.

Dengan mengacu pada tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD tersebut di atas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAD beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tahun 2017-2022

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKAD Tahun 2018-2020

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN			TARGET AKHIR RENSTRA
					2018	2019	2020	
1	Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	82	85	89	89
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah		Persentase capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	100	100	100	100
		Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah	Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%	100	100	100	100
			Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	%	100	100	100	100
			Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca	%	100	100	100	100
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75	77	79	79
			Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	2	3	3	3
			Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100	100

Tahun 2017-2022

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKAD Tahun 2021-2022

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN		TARGET AKHIR RENSTRA
					2021	2022	
1	Terwujudnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	61-70 (B)	61-70 (B)	61-70 (B)
		Meningkatnya kualitas layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	77-88 (Baik)	77-88 (Baik)	77-88 (Baik)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang akuntabel	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori (Poin)	A (83)	A (84)	A (84)
2	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	70	72	72
		Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel	Opini BPK atas LKPD Kota Tasikmalaya	Opini	WTP	WTP	WTP

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mudah, cepat dan transparan berbasis teknologi informasi;
- 2) Meningkatkan kualitas SDM Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 3) Penguatan pemahaman dan komitmen terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- 4) Meningkatkan integritas, kompetensi, disiplin, dan kinerja aparatur;
- 5) Mengintegrasikan sistem informasi perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset daerah;
- 6) Menambah sumber daya aparatur yang mengelola pensertifikatan aset tetap tanah;
- 7) Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan rekonsiliasi pengelolaan barang milik daerah.

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai;
- 2) Penyediaan anggaran yang memadai untuk kegiatan pelatihan/ bimbingan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja BPKAD;
- 3) Pengendalian terintegrasi dalam pelaksanaan tindakan manajerial dan kegiatan teknis;
- 4) Penyediaan anggaran yang memadai untuk kegiatan pelatihan/ bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada Seluruh Pegawai;

Tahun 2017-2022

- 5) Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, BPKP dan Kemendagri;
- 6) Melaksanakan rotasi internal pegawai untuk menambah pengelola pensertifikatan tanah dan meningkatkan koordinasi yang baik dengan BPN Kota Tasikmalaya;
- 7) Penyediaan anggaran yang memadai untuk kegiatan rekonsiliasi pengelolaan barang milik daerah.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan, tujuan dan sasaran BPKAD dengan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 tercantum pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	KOTA TASIKMALAYA YANG RELIGIUS, MAJU DAN MADANI		
MISI 5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		
Tujuan 8	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme berbasis teknologi informasi		
Sasaran 15	Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi		
Sasaran 16	Meningkatnya sistem akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah		
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Terwujudnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	1.1. Meningkatnya kualitas layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan 1.2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang akuntabel	1.1. Meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mudah, cepat dan transparan berbasis teknologi informasi; 1.2. Meningkatkan kualitas SDM Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;	1.1. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai; 1.2. Penyediaan anggaran yang memadai untuk kegiatan pelatihan/ bimbingan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja BPKAD;

Tahun 2017-2022

		1.3. Penguatan pemahaman dan Komitmen terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.	1.3. Pengendalian terintegrasi dalam pelaksanaan tindakan manajerial dan kegiatan teknis Perangkat Daerah.
2. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel	2.1. Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel	<p>2.1. Meningkatkan integritas, kompetensi, disiplin, dan kinerja aparatur dengan memberikan pelatihan/ bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada Seluruh Pegawai;</p> <p>2.2. Mengintegrasikan sistem informasi perencanaan pembangunan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan aset daerah;</p> <p>2.3. Menambah sumber daya aparatur yang mengelola pensertifikatan aset tetap tanah;</p> <p>2.4. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan rekonsiliasi pengelolaan barang milik daerah.</p>	<p>2.1. Penyediaan anggaran yang memadai untuk kegiatan pelatihan/ bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada Seluruh Pegawai;</p> <p>2.2. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, BPKP dan Kemendagri;</p> <p>2.3. Melaksanakan rotasi internal pegawai untuk menambah pengelola pensertifikatan tanah dan meningkatkan koordinasi yang baik dengan BPN Kota Tasikmalaya;</p> <p>2.4. Penyediaan anggaran yang memadai untuk kegiatan rekonsiliasi pengelolaan barang milik daerah.</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Dengan ditetapkannya tujuan, strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran, maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditentukan sebagai *action* dalam pemenuhan *organization progress*.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - 2) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

Secara rinci rencana program, kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan serta pendanaan indikatif BPKAD tercantum pada Tabel 6.1.

Tahun 2017-2022

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2018-2020
BPKAD Kota Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
						2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah				Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai 78,91	82 Nilai	4.855.774.000	Nilai 85	3.540.877.460	Nilai 89	2.125.391.300	Nilai 89	10.522.042.760	BPKAD	BPKAD
	Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah			Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai 78,91	82 Nilai	4.855.774.000	Nilai 85	3.540.877.460	Nilai 89	2.125.391.300	Nilai 89	10.522.042.760	BPKAD	BPKAD
		4.04.44	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai 78,91			Nilai 85	10.000.000	Nilai 89	2.000.000	Nilai 89	12.000.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.44.336	Penyusunan SPM/SOP tentang Pelayanan Publik	Jumlah dokumen SOP yang disusun				20 SPM/SOP	5.000.000			20 SPM/SOP	5.000.000	Sekretariat	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		4.04.44.06	Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik	Jumlah dokumen hasil survey				1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	7.000.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian kelengkapan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	2.214.844.000	100%	1.876.030.460	100%	1.094.491.300	100%	5.185.365.760	Sekretariat	BPKAD
		4.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek		800 Buah	3.600.000	800 Buah 12 Buku	3.600.000	800 Buah 12 Buku	1.440.000	2400 Buah 24 Buku	8.640.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet		12 Bulan	867.000.000	12 Bulan	558.000.000	12 Bulan	288.000.000	36 Bulan	1.713.000.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah kendaraan / bangunan kantor yang diasuransikan		9 Unit	70.000.000	9 Unit	71.000.000	9 Unit	70.100.000	27 Unit	211.100.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB dan perpanjangan STNK		31 Unit	115.550.000	31 Unit	75.550.000	31 Unit	35.950.000	93 Unit	227.050.000	Sekretariat	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		4.04.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa kebersihan		12 Bulan	215.268.000	12 Bulan	222.305.000	12 Bulan	241.765.000	36 Bulan	679.338.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor		20 Jenis	88.228.000	20 Jenis	81.000.000	20 Jenis	26.151.300	60 Jenis	195.379.300	Sekretariat	BPKAD
		4.04.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan		13 Jenis	85.000.000	13 Jenis	72.600.000	13 Jenis	24.685.000	39 Jenis	182.285.000	Sekretariat	BPKAD
				Jumlah penggandaan		21275 Lembar		21275 Lembar		21275 Lembar		63825 Lembar	-		
				Jumlah penjilidan		110 Buku		110 Buku		110 Buku		330 Buku	-		
		4.04.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		13 Buah	10.000.000	13 Buah	15.000.000	13 Buah	10.000.000	39 Buah	35.000.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		17 Buah	77.000.000	17 Buah	79.200.000	17 Buah	31.000.000	51 Buah	187.200.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga		17 Unit	43.600.000	17 Unit	15.000.000	17 Unit		51 Unit	58.600.000	Sekretariat	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		4.04.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan		360 Eksemplar	24.000.000	360 Eksemplar	24.000.000	360 Eksemplar	20.000.000	1080 Eksemplar	68.000.000	Sekretariat	BPKAD
				Jumlah iklan media massa		10 Kali		10 Kali		10 Kali		30 Kali			
		4.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makan dan minum rapat dan jamuan tamu		3500 Dus	99.548.000	3500 Dus	96.875.460	3500 Dus	36.900.000	10500 Dus	233.323.460	Sekretariat	BPKAD
				Jumlah makan dan minum harian		14 Jenis		14 Jenis		14 Jenis		42 Jenis			
		4.04.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		128 Kali	373.000.000	130 Kali	401.000.000	130 Kali	100.400.000	272 Kali	874.400.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.01.21	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor		4 Orang	136.800.000	4 Orang	152.400.000	4 Orang	156.000.000	4 Orang	445.200.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.01.22	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	Jumlah jasa peningkatan pelayanan pegawai		20 Paket	6.250.000	20 Paket	8.500.000	20 Paket	52.100.000	60 Paket	66.850.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur sesuai standar	100%	100%	2.580.530.000	100%	1.609.847.000	100%	1.028.900.000	100%	5.219.277.000	Sekretariat	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

				Persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara	100%	100%		100%		100%		100%		Sekretariat	BPKAD
		4.04.02.04	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah kendaraan mobil jabatan				1 Unit	350.000.000			1 Unit	350.000.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor		1 Unit	475.000.000	1 Unit	300.000.000		365.000.000	3 Unit	1.140.000.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor		1 Unit	10.000.000	1 Unit	45.000.000			2 Unit	55.000.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.02.10	Pengadaan Meubelair	Jumlah meubelair kantor		3 Unit	105.000.000	3 Unit				6 Unit	105.000.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor		1 Paket	480.000.000	1 Paket	190.000.000		163.000.000	3 Paket	833.000.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.02.23	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan	Jumlah frekuensi pemeliharaan mobil jabatan		6 Kali	188.050.000	6 Kali	151.875.000		142.467.400	18 Kali	482.392.400	Sekretariat	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		4.04.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas / operasional		13 Kali	129.760.000	13 Kali	132.945.000	13 Kali	113.472.600	39 Kali	376.177.600	Sekretariat	BPKAD
		4.04.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah frekuensi pemeliharaan perlengkapan gedung kantor		3 Kali	91.720.000	3 Kali	123.600.000	3 Kali	97.300.000	9 Kali	312.620.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.02.29	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair	Jumlah pemeliharaan rutin / berkala meubelair		3 Kali	20.000.000	3 Kali	25.000.000	3 Kali		9 Kali	45.000.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.02.30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah frekuensi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor		30 Kali	60.000.000	30 Kali	80.400.000	30 Kali	28.000.000	90 Kali	168.400.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.02.45	Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	Jumlah jasa prasarana aparatur		2 Paket	45.000.000	2 Paket	45.000.000	2 Paket	19.600.000	6 Paket	109.600.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.02.48	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor		15 Unit	976.000.000	15 Unit	166.027.000	15 Unit	100.060.000	45 Unit	1.242.087.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan sarana disiplin aparatur	100%	100%	40.400.000	100%	45.000.000		-	100%	85.400.000	Sekretariat	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		4.04.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu		140 Potong	40.400.000	140 Potong	45.000.000			420 Potong	85.400.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan	100%	100%	20.000.000	-	-			100%	20.000.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta		10 Orang	20.000.000					30 Orang	20.000.000	Sekretariat	BPKAD
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah				Persentase capaian pengelolaan keuangan dan aset daerah	100%	100%	5.730.319.300	100%	5.625.229.921	100%	3.624.623.326	100%	14.514.563.547	BPKAD	BPKAD
	Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah			Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	100%	100%	5.613.919.300	100%	5.530.229.921	100%	3.584.623.326	100%	14.263.163.547	BPKAD	BPKAD
				Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	100%	100%		100%		100%		100%		BPKAD	BPKAD
				Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca	100%	100%		100%		100%		100%		BPKAD	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		4.04.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketepatan waktu perencanaan keuangan perangkat daerah	100%	100%	3.666.223.300	100%	4.123.180.800	100%	2.334.260.000	100%	10.123.664.100	Bidang Anggaran	BPKAD
				Persentase penatausahaan pendapatan dan belanja daerah	100%	100%		100%		100%		100%		Bidang Perbendaharaan	BPKAD
				Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	100%	100%		100%		100%		100%		Bidang Akuntansi	BPKAD
				Persentase pemanfaatan teknologi informasi pengelolaan keuangan daerah	100%	100%		100%		100%		100%		Bidang Akuntansi	BPKAD
		4.04.15.01	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	1 Ranperda	1 Ranperda	184.030.000	1 Ranperda	212.830.000	1 Ranperda	92.399.000	3 Ranperda	489.259.000	Bidang Anggaran	BPKAD
		4.04.15.02	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 Ranperwal	1 Ranperwal	119.000.000	1 Ranperwal	122.960.000	1 Ranperwal	100.467.500	3 Ranperwal	342.427.500	Bidang Anggaran	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		4.04.15.03	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	1 Ranperda	1 Ranperda	195.230.000	1 Ranperda	215.840.000	1 Ranperda	100.282.000	3 Ranperda	511.352.000	Bidang Anggaran	BPKAD
		4.04.15.04	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Ranperwal	1 Ranperwal	102.800.000	1 Ranperwal	133.300.000	1 Ranperwal	94.032.000	3 Ranperwal	330.132.000	Bidang Anggaran	BPKAD
		4.04.15.05	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Pedoman Penyusunan APBD	1 Ranperwal	1 Ranperwal	75.010.000	1 Ranperwal	101.260.000	1 Ranperwal	81.026.000	3 Ranperwal	257.296.000	Bidang Anggaran	BPKAD
		4.04.15.06	Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Percepatan Perubahan Penjabaran APBD	1 Ranperwal	1 Ranperwal	164.330.000	1 Ranperwal	138.330.000	1 Ranperwal	124.155.000	3 Ranperwal	426.815.000	Bidang Anggaran	BPKAD
		4.04.15.07	Verifikasi Dokumen Anggaran	Jumlah dokumen anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya	1000 RKA/RKPA	1000 RKA/RKPA	107.019.000	1000 RKA/RKPA	99.730.000	1000 RKA/RKPA	105.515.000	3000 RKA/RKPA	312.264.000	Bidang Anggaran	BPKAD
		4.04.15.08	Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen rekonsiliasi target anggaran pendapatan daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	102.845.000	4 Dokumen	86.510.000	4 Dokumen	50.789.500	12 Dokumen	240.144.500	Bidang Anggaran	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		4.04.15.09	Pengelolaan Data Anggaran	Jumlah dokumen data anggaran				1 Dokumen	85.720.000	1 Dokumen	73.915.000	2 Dokumen	159.635.000	Bidang Anggaran	BPKAD
			Sinergitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000					3 Dokumen	200.000.000	Bidang Anggaran	BPKAD
		4.04.15.11	Penatausahaan Bantuan Keuangan Provinsi	Jumlah dokumen laporan penatausahaan bantuan keuangan provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	169.626.000	1 Dokumen	148.520.000	1 Dokumen	116.260.000	3 Dokumen	434.406.000	Bidang Anggaran	BPKAD
		4.04.15.12	Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen SPD yang disyaratkan dalam administrasi pengelolaan keuangan daerah dan dokumen SP2D yang menunjang kelancaran penatausahaan keuangan daerah	10.000 dan 15.000 SPD dan SP2D	10.000 dan 15.000 SPD dan SP2D	185.500.000	10.000 dan 15.000 SPD dan SP2D	248.751.040	10.000 dan 15.000 SPD dan SP2D	172.200.000	20.000 dan 30.000 SPD dan SP2D	606.451.040	Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		4.04.15.13	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan yang mengikuti	41 dan 14 Orang	41 dan 14 Orang	180.000.000	41 dan 14 Orang	220.000.000	41 dan 14 Orang		41 dan 14 Orang	400.000.000	Bidang Perbendaharaan	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

				pembinaan pengelolaan keuangan daerah											
		4.04.15.14	Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah dokumen kendali pelaksanaan realisasi APBD	4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	36.000.000	12 Dokumen	131.000.000	Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		4.04.15.15	Penyusunan Laporan Daftar Transaksi Harian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rekapitulasi transaksi harian dari BUD	4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000	4 Dokumen		4 Dokumen	27.000.000	12 Dokumen	87.000.000	Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		4.04.15.16	Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya	Jumlah leger gaji pegawai pada sistem penggajian	102/17 Dus / Kali	102 /17 Dus / Kali	170.000.000	102/17 Dus / Kali	170.000.000	102/17 Dus / Kali	132.500.000	204/34 Dus / Kali	472.500.000	Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		4.04.15.17	Pelaporan Pajak Orang Pribadi	Jumlah SPT pelaporan pajak orang pribadi	7500 SPT	7500 SPT	70.000.000	7500 SPT		7500 SPT		22500 SPT	70.000.000	Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		4.04.15.18	Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji	Jumlah dokumen laporan tahunan PPh Pasal 21 khusus gaji	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	107.329.760	1 Dokumen	51.750.000	3 Dokumen	219.079.760	Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		4.04.15.19	Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah dokumen laporan pemberian hibah dan bantuan sosial	4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	63.669.000	12 Dokumen	338.669.000	Bidang Perbendaharaan	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		4.04.15.20	Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah dokumen laporan bantuan keuangan partai politik	1 Dokumen	1 Dokumen	45.833.300	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	3 Dokumen	95.833.300	Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		4.04.15.21	Penatausahaan Dana Transfer	Jumlah dokumen laporan realisasi dana transfer	4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	150.000.000	67.500.000	12 Dokumen	367.500.000	Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		4.04.15.22	Peningkatan Penatausahaan Dana Kapitasi JKN dan Dana BOS	Jumlah dokumen laporan SP2B JKN FKTF dan SP2B BOS	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000		6 Dokumen	100.000.000	Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		4.04.15.23	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	1 Ranperda	1 Ranperda	200.000.000	1 Ranperda	268.000.000	206.426.000	3 Ranperda	674.426.000	Bidang Akuntansi	BPKAD
		4.04.15.24	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	1 Ranperwal	1 Ranperwal	100.000.000	1 Ranperwal	200.000.000	193.700.000	3 Ranperwal	493.700.000	Bidang Akuntansi	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		4.04.15.26	Penyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi pertanggung jawaban APBD Kota Tasikmalaya	2 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	132.100.000	2 Dokumen	129.400.000	6 Dokumen	381.500.000	Bidang Akuntansi	BPKAD
		4.04.15.28	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPKD	2 Dokumen	2 Dokumen	115.000.000	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	196.200.000	6 Dokumen	511.200.000	Bidang Akuntansi	BPKAD
		4.04.15.29	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jasa konsultasi pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	1 Paket	1 Paket	255.000.000	1 Paket	525.000.000	1 Paket	98.000.000	3 Paket	878.000.000	Bidang Akuntansi	BPKAD
		4.04.15.30	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK Perangkat Daerah dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua	Jumlah PPK Perangkat Daerah, PPKD, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan yang menjadi peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola keuangan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual	92 Orang	92 Orang	200.000.000	92 Orang	32.000.000	92 Orang	21.074.000	92 Orang	253.074.000	Bidang Akuntansi	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		4.04.15.31	Review Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Rancangan Peraturan Walikota Tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Ranperwal			2 Ranperwal	50.000.000			2 Ranperwal	50.000.000	Bidang Akuntansi	BPKAD
		4.04.15.32	Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	Jumlah sidang pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)	6 Kali	6 Kali	150.000.000	6 Kali	140.000.000	6 Kali	18 Kali	290.000.000		Sekretariat	BPKAD
		4.04.18	Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	100%	100%	1.947.696.000	100%	1.407.049.121	100%	1.250.363.326	4.139.499.447		Bidang Aset Daerah	BPKAD
				Persentase inventarisasi aset milik daerah	100%			100%		100%	100%			Bidang Aset Daerah	BPKAD
				Persentase tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang bersertifikat	33,68%			38%		40%	40%			Bidang Aset Daerah	BPKAD
		4.04.18.01	Pembuatan Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya	Jumlah paket profil tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya				1 Paket	106.000.000	1 Paket	16.500.000	122.500.000		Bidang Aset Daerah	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

			(Protasik)	berbasis teknologi informasi											
		4.04.18.02	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Rencana Hibah Barang Milik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	56.831.000	3 Dokumen	60.450.000	3 Dokumen	17.219.700	9 Dokumen	134.500.700	Bidang Aset Daerah	BPKAD
		4.04.18.03	Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang yang menjadi peserta pembinaan teknis penatausahaan barang milik daerah	110 Orang	110 Orang	349.696.000	110 Orang	269.700.000	110 Orang	110 Orang	110 Orang	619.396.000	Bidang Aset Daerah	BPKAD
		4.04.18.04	Pemindahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	255.966.000	2 Dokumen	171.361.957	2 Dokumen	135.000.000	6 Dokumen	562.327.957	Bidang Aset Daerah	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		4.04.18.05	Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah	Jumlah dokumen pencatatan aset / barang milik daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	226.830.000	6 Dokumen	408.650.000	6 Dokumen	461.005.000	18 Dokumen	1.096.485.000	Bidang Aset Daerah	BPKAD
		4.04.18.06	Pengamanan Aset / Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya	608 Sertifikat	30 Sertifikat	362.534.000	30 Sertifikat	265.887.164	30 Sertifikat	167.128.626	90 Sertifikat	795.549.790	Bidang Aset Daerah	BPKAD
		4.04.18.07	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	155.230.000	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	53.510.000	3 Dokumen	333.740.000	Bidang Aset Daerah	BPKAD
		4.04.18.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah papan nama aset milik Pemerintah Kota Tasikmalaya	341 Papan Nama Aset	51 Papan Nama Aset	75.000.000	51 Papan Nama Aset		51 Papan Nama Aset		153 Papan Nama Aset	75.000.000	Bidang Aset Daerah	BPKAD
		4.04.18.11	Pengadaan Aset/ Barang Milik Daerah	Jumlah aset/barang milik daerah						7 Unit	400.000.000	7 Unit	400.000.000	Bidang Aset Daerah	BPKAD
		4.04.18.117	Sensus Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Sensus Barang Milik Daerah		6 Dokumen	465.609.000								
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah			Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai 73,53	Nilai 75	116.400.000	Nilai 77	95.000.000	Nilai 79	40.000.000	Nilai 79	251.400.000	Bidang Aset Daerah	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

				Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level 1	Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Bidang Aset Daerah	BPKAD
				Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	100%	100%		100%		100%		100%		Bidang Aset Daerah	BPKAD
		4.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Nilai 73,53	Nilai 75	65.000.000	Nilai 77	65.000.000	Nilai 79	20.000.000	Nilai 79	150.000.000	Sekretariat	BPKAD
				Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	100%	100%		100%		100%		100%		Sekretariat	BPKAD
				Maturitas SPIP perangkat daerah	Level 1	Level 2		Level 3		Level 3		Level 3		Sekretariat	BPKAD
		4.04.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	5.000.000	3 Dokumen	30.000.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan keuangan semesteran dan akhir	2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	65.000.000	Sekretariat	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

				tahun sesuai SAP											
		4.04.06.03	Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan barang semesteran dan akhir tahun sesuai SAP	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	45.000.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.06.04	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan SPIP	1 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	10.000.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.13	Program Perencanaan Kerja	Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	100%	100%	41.400.000	100%	30.000.000	100%	20.000.000	100%	91.400.000	Sekretariat	BPKAD
				Persentase keselarasan Renja PD terhadap RKPD	100%	100%		100%		100%		100%		Sekretariat	BPKAD
		4.04.13.01	Penyusunan Rencana Kerja	Jumlah rencana kerja yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	2.000.000	3 Dokumen	22.000.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.13.02	Penyusunan Rencana Strategis	Jumlah rencana strategis yang disusun		1 Dokumen	10.000.000					1 Dokumen	10.000.000	Sekretariat	BPKAD
		4.04.13.03	Penyusunan Perubahan Rencana Strategis	Jumlah perubahan rencana strategis yang disusun						1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	Sekretariat	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		4.04.13.04	Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan triwulanan	4 Dokumen	4 Dokumen	21.400.000	4 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	13.000.000	12 Dokumen	54.400.000	Sekretariat	BPKAD
		4.01.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase pengelolaan website BPKAD		100%	10.000.000		.		.	100%	10.000.000	Sekretariat	BPKAD
		4.01.23.25	Pengelolaan Website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah website yang dikelola	1 Paket	1 Paket	10.000.000					1 Paket	10.000.000	Sekretariat	BPKAD

Tahun 2017-2022

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2021-2022
BPKAD Kota Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Kode Ring	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung-jawab	Lokasi
					2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terwujudnya pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel				Indeks Reformasi Birokrasi	61-70 (B)	11.618.030.056	61-70 (B)	12.193.030.056	61-70 (B)	23.811.060.112	BPKAD	BPKAD
	Meningkatnya kualitas layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan			Capaian IKM Perangkat Daerah	77-88 (Baik)	2.387.650.000	77-88 (Baik)	2.592.600.000	77-88 (Baik)	4.980.250.000	BPKAD	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian IKM Perangkat Daerah	77-88 (Baik)	2.387.650.000	77-88 (Baik)	2.592.600.000	77-88 (Baik)	4.980.250.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan barang milik daerah BPKAD	4 Dokumen	125.100.000	4 Dokumen	135.100.000	8 Dokumen	260.200.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	20.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan/ bangunan kantor yang diasuransikan	24 Unit	95.100.000	24 Unit	95.100.000	48 Unit	190.200.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang semesteran dan akhir tahun	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	30.000.000	4 Dokumen	50.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan kepegawaian BPKAD	12 Dokumen	33.611.000	12 Dokumen	43.000.000	24 Dokumen	76.611.000	Sekretariat	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian khusus hari tertentu pegawai	70 Buah	23.611.000	80 Buah	28.000.000	150 Buah	51.611.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan monev penilaian kinerja pegawai	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	15.000.000	24 Dokumen	25.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu penyelenggaraan pelayanan administrasi umum BPKAD	12 Bulan	718.522.500	12 Bulan	745.000.000	12 Bulan	1.463.522.500	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Jenis	15.000.000	20 Jenis	20.000.000	32 Jenis	35.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor, Jumlah perlengkapan kantor	31 Jenis, 16 Unit	185.067.000	35 Jenis	150.000.000	66 Jenis, 16 Unit	335.067.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga	22 Jenis	25.455.500	25 Jenis	30.000.000	47 Jenis	55.455.500	Sekretariat	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jasa prasarana aparatur	29 Jenis	50.000.000	30 Jenis	65.000.000	59 Jenis	115.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, Jumlah penggandaan, Jumlah penjilidan	8 Jenis, 15444 Lembar, 100 Buku	53.000.000	10 Jenis, 16550 Lembar, 110 Buku	65.000.000	18 Jenis, 31994 Lembar, 210 Buku	118.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan iklan media massa	264 Eksemplar dan 10 Kali	25.000.000	264 Eksemplar dan 12 Kali	30.000.000	528 Eksemplar dan 22 Kali	55.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah alat tulis kantor	18 Jenis	60.000.000	20 Jenis	65.000.000	38 Jenis	125.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan minum rapat, jamuan tamu dan makan minum harian	2854 Dus	85.000.000	2895 Dus	95.000.000	5749 Dus	180.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	80 Kali	200.000.000	80 Kali	200.000.000	160 Kali	400.000.000	Sekretariat	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen yang diarsipkan	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	15.000.000	24 Dokumen	25.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengelolaan website/aplikasi/ sistem informasi	1 Website	10.000.000	1 Website	10.000.000	1 Website	20.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	12 Buah	190.000.000	12 Buah	220.000.000	12 Buah	410.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubelair kantor	12 Buah	60.000.000	12 Buah	95.000.000	24 Buah	155.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor	1 Paket	130.000.000	1 Paket	125.000.000	2 Paket	255.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa perkantoran	12 Bulan	880.076.000	12 Bulan	989.500.000	12 Bulan	1.869.576.000	Sekretariat	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan buku cek	492 Buah dan 9 Buah	4.000.000	525 Buah dan 12 Buah	6.500.000	1017 Buah dan 21 Buah	10.500.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa telepon dan listrik	12 Bulan	346.000.000	12 Bulan	398.000.000	12 Bulan	744.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah frekuensi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	24 Kali	58.000.000	24 Kali	60.000.000	48 Kali	118.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa keamanan dan ketertiban kantor Jumlah jasa kebersihan kantor Jumlah jasa Supir Kepala Badan	4 Orang 6 Orang 1 Orang	472.076.000	4 Orang 6 Orang 1 Orang	525.000.000	4 Orang 6 Orang 1 Orang	997.076.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	91 Unit	440.340.500	91 Unit	460.000.000	182 Unit	900.340.500	Sekretariat	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	20 Unit	181.000.000	20 Unit	185.000.000	40 Unit	366.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang	4 Unit	119.340.500	4 Unit	125.000.000	8 Unit	244.340.500	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meubelair kantor yang dipelihara	66 Buah	20.000.000	66 Buah	25.000.000	132 Buah	45.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	120.000.000	1 Unit	125.000.000	2 Unit	245.000.000	Sekretariat	BPKAD
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang akuntabel			Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A (83)	9.230.380.056	A (84)	9.600.430.056	A (84)	18.830.810.112	BPKAD	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A (83)	9.230.380.056	A (84)	9.600.430.056	A (84)	18.830.810.112	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja BPKAD	13 Dokumen	150.000.000	13 Dokumen	150.000.000	26 Dokumen	300.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana kerja	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	4 Dokumen	150.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	12 RKA	15.000.000	12 RKA	15.000.000	24 RKA	30.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA	12 RKAP	15.000.000	12 RKAP	15.000.000	24 RKAP	30.000.000	Sekretariat	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan penyelenggaraan SPIP, dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan, dokumen hasil survei kepuasan masyarakat, dokumen Reformasi Birokrasi, dan dokumen Zona Integritas	9 Dokumen	45.000.000	9 Dokumen	45.000.000	18 Dokumen	90.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan BPKAD	10 Dokumen	9.080.380.056	10 Dokumen	9.450.430.056	20 Dokumen	18.530.810.112	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan	12 Bulan	9.027.380.056	12 Bulan	9.375.430.056	12 Bulan	18.402.810.112	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4 Dokumen	13.000.000	4 Dokumen	15.000.000	8 Dokumen	28.000.000	Sekretariat	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi	4 Dokumen	15.000.000	4 Dokumen	20.000.000	8 Dokumen	35.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	30.000.000	Sekretariat	BPKAD
		5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	35.000.000	Sekretariat	BPKAD
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70	5.640.000.000	72	5.880.000.000	72	11.520.000.000	BPKAD	BPKAD
Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel				Opini BPK atas LKPD Kota Tasikmalaya	WTP	5.640.000.000	WTP	5.880.000.000	WTP	11.520.000.000	BPKAD	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	100%	1.716.000.000	100%	1.806.000.000	100%	3.522.000.000	Bidang Anggaran	BPKAD
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen penganggaran keuangan daerah	23 Dokumen	1.716.000.000	23 Dokumen	1.806.000.000	46 Dokumen	3.522.000.000	Bidang Anggaran	BPKAD
		5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS	2 Dokumen	145.800.000	2 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	295.800.000	Bidang Anggaran	BPKAD
		5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	145.800.000	2 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	295.800.000	Bidang Anggaran	BPKAD
		5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang diverifikasi	300 RKA	45.350.000	300 RKA	45.000.000	600 RKA	90.350.000	Bidang Anggaran	BPKAD
		5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	300 RKA	44.350.000	300 RKA	45.000.000	600 RKA	89.350.000	Bidang Anggaran	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang diverifikasi	300 DPA	44.350.000	300 DPA	45.000.000	600 DPA	89.350.000	Bidang Anggaran	BPKAD
		5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA SKPD yang diverifikasi	300 DPA	44.350.000	300 DPA	45.000.000	600 DPA	89.350.000	Bidang Anggaran	BPKAD
		5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Ranperda APBD dan Ranperwal Penjabaran APBD	1 Ranperda dan 1 Ranperwal	207.300.000	1 Ranperda dan 1 Ranperwal	250.000.000	2 Ranperda dan 2 Ranperwal	457.300.000	Bidang Anggaran	BPKAD
		5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Ranperda Perubahan APBD, Ranperwal Penjabaran Perubahan APBD, dan Ranperwal Percepatan Perubahan Penjabaran APBD	1 Ranperda dan 2 Ranperwal	207.300.000	1 Ranperda dan 2 Ranperwal	200.000.000	2 Ranperda dan 4 Ranperwal	407.300.000	Bidang Anggaran	BPKAD
		5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi bidang anggaran	4 Dokumen	598.350.000	4 Dokumen	591.000.000	8 Dokumen	1.189.350.000	Bidang Anggaran	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah dokumen perencanaan anggaran pendapatan	4 Dokumen	44.350.000	2 Dokumen	45.000.000	6 Dokumen	89.350.000	Bidang Anggaran	BPKAD
		5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran belanja daerah	4 Dokumen	44.350.000	2 Dokumen	45.000.000	6 Dokumen	89.350.000	Bidang Anggaran	BPKAD
		5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen perencanaan anggaran pembiayaan	2 Dokumen	44.350.000	2 Dokumen	45.000.000	4 Dokumen	89.350.000	Bidang Anggaran	BPKAD
		5.02.02.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan perencanaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Kali	100.000.000	1 Kali	150.000.000	2 Kali	250.000.000	Bidang Anggaran	BPKAD
		5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi belanja terhadap target belanja yang telah ditetapkan	95%	904.000.000	95%	1.054.000.000	95%	904.000.000	Bidang Perbendaharaan	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan keuangan daerah	160 Dokumen	904.000.000	50 Dokumen	1.054.000.000	100 Dokumen	1.958.000.000	Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah dokumen B9	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	50.000.000	24 Dokumen	75.000.000	Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen anggaran kas SKPD, Jumlah SPD terbit	380 Dokumen dan 380 SPD	25.000.000	380 Dokumen dan 380 SPD	50.000.000	760 Dokumen dan 760 SPD	75.000.000	Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi hibah dan bansos	4 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	200.000.000	Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah dokumen laporan pengelolaan dana transfer	4 Dokumen	115.000.000	4 Dokumen	165.000.000	8 Dokumen	280.000.000	Bidang Perbendaharaan	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan tugas Tim Satgas TP2DD	4 Dokumen	65.000.000	4 Dokumen	65.000.000	8 Dokumen	130.000.000	Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah dokumen ledger gaji yang diterbitkan	12 Dokumen	259.000.000	12 Dokumen	259.000.000	24 Dokumen	518.000.000	Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen laporan rekonsiliasi BPJS	12 Dokumen	115.000.000	12 Dokumen	115.000.000	24 Dokumen	230.000.000	Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Rancangan SK tentang PA/PB, KPA/KPB, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu	80 Rancangan SK	50.000.000	80 Rancangan SK	100.000.000	160 Rancangan SK	150.000.000	Bidang Perbendaharaan	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan pengelolaan keuangan daerah	100 Orang	150.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	300.000.000	Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Tahun	10.530.004.660	1 Tahun	10.755.004.660	1 Tahun	21.285.009.320	Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		5.02.02.2.04.07	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah pemberian subsidi	1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	275.000.000	1 Tahun	525.000.000	Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah pemberian dana darurat dan mendesak	1 Tahun	10.280.004.660	1 Tahun	10.480.004.660	1 Tahun	20.760.009.320	Bidang Perbendaharaan	BPKAD
		5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah sesuai SAP	100%	1.020.000.000	100%	1.020.000.000	100%	2.040.000.000	Bidang Akuntansi	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		5.02.02.2.03	Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan keuangan daerah	20 Dokumen	1.020.000.000	20 Dokumen	1.020.000.000	40 Dokumen	2.040.000.000	Bidang Akuntansi	BPKAD
		5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	200.000.000	Bidang Akuntansi	BPKAD
		5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	12 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	100.000.000	24 Dokumen	200.000.000	Bidang Akuntansi	BPKAD
		5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPKD	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	200.000.000	Bidang Akuntansi	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperwal Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Ranperda dan 1 Ranperwal	300.000.000	1 Ranperda dan 1 Ranperwal	300.000.000	2 Ranperda dan 2 Ranperwal	600.000.000	Bidang Akuntansi	BPKAD
		5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah dokumen laporan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah	2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	400.000.000	Bidang Akuntansi	BPKAD
		5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah laporan indeks pengelolaan keuangan daerah	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	200.000.000	Bidang Akuntansi	BPKAD
		5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	92 Orang	120.000.000	92 Orang	120.000.000	92 Orang	240.000.000	Bidang Akuntansi	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase inventarisasi aset milik daerah	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	4.000.000.000	Bidang Aset Daerah	BPKAD
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	81 Dokumen	2.000.000.000	81 Dokumen	2.000.000.000	162 Dokumen	4.000.000.000	Bidang Aset Daerah	BPKAD
		5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar harga Pemerintah Kota Tasikmalaya	1 Dokumen	149.242.000	1 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	399.242.000	Bidang Aset Daerah	BPKAD
		5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah	1 Dokumen	19.235.000	1 Dokumen	150.000.000	2 Dokumen	169.235.000	Bidang Aset Daerah	BPKAD
		5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Rencana Hibah Barang Milik Daerah serta Jumlah pengadaan mobil jabatan	3 Dokumen dan 1 Unit	556.848.000	3 Dokumen dan 1 Unit	500.000.000	6 Dokumen dan 2 Unit	1.056.848.000	Bidang Aset Daerah	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang Perangkat Daerah	36 Dokumen	302.045.000	36 Dokumen	250.000.000	72 Dokumen	552.045.000	Bidang Aset Daerah	BPKAD
		5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen inventarisasi BMD	2 Dokumen	57.704.000	2 Dokumen	50.000.000	4 Dokumen	107.704.000	Bidang Aset Daerah	BPKAD
		5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya, jumlah dokumen titik koordinat dan pengamanan barang milik daerah	30 Sertifikat, 1 Dokumen dan 1 Tahun	212.119.000	100 Sertifikat, 1 Dokumen dan 1 Tahun	200.000.000	130 Sertifikat, 2 Dokumen dan 2 Tahun	412.119.000	Bidang Aset Daerah	BPKAD
		5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penilaian BMD	2 Dokumen	76.939.000	2 Dokumen	100.000.000	4 Dokumen	176.939.000	Bidang Aset Daerah	BPKAD
		5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pemindahtanganan barang milik daerah	2 Dokumen	241.174.000	2 Dokumen	150.000.000	4 Dokumen	391.174.000	Bidang Aset Daerah	BPKAD

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2017-2022

		5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah	1 Dokumen	76.939.000	100.000.000	1 Dokumen	176.939.000	Bidang Aset Daerah	BPKAD
		5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan barang milik daerah dari SKPD	2 Dokumen	76.939.000	150.000.000	2 Dokumen	226.939.000	Bidang Aset Daerah	BPKAD
		5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pembinaan pengelolaan barang milik daerah	100 Orang	230.816.000	100.000.000	100 Orang	330.816.000	Bidang Aset Daerah	BPKAD

Tahun 2017-2022

BAB VII**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja BPKAD bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam periode lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya yang tertuang di dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2018-2020 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Renstra	Target Capaian Setiap Tahun			Target Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	
1	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	78,91	82	85	89	91
2	Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%	100	100	100	100	100
3	Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	%	100	100	100	100	100
4	Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca	%	100	100	100	100	100
5	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,53	75	77	79	82
6	Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	1	2	3	3	4
7	Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	100	100	100	100	100

Tahun 2017-2022

Tabel 7.2
Indikator Kinerja BPKAD Tahun 2021-2022 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun		Target Akhir RPJMD
			2021	2022	
1	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	77-88 (Baik)	77-88 (Baik)	77-88 (Baik)
2	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori (Poin)	A (83)	A (84)	A (84)
3	Opini BPK atas LKPD Kota Tasikmalaya	Opini	WTP	WTP	WTP

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicator* sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPKAD. Adapun IKU BPKAD ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 7.3
IKU BPKAD Tahun 2018-2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN/ PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	Capaian IKM Perangkat Daerah	Nilai	Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat	BPKAD
2.	Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah	Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya	%	Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 116 Ayat (1) Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perda APBD yang telah Dievaluasi Ditetapkan oleh Kepala Daerah Menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perda APBD. Ayat (2) Penetapan Rancangan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perda APBD sebagaimana pada Ayat 1 Dilakukan Paling Lambat Tanggal 31 Desember.	(Realisasi waktu penetapan Perda APBD / Target waktu penetapan Perda APBD x 100	Bidang Anggaran	BPKAD

Tahun 2017-2022

		Persentase laporan keuangan daerah sesuai SAP	%	Laporan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Laporan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Bidang Akuntansi	BPKAD
		Persentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca	%	Jumlah Neraca SKPD Termasuk Rincian Total BMD Harus Sesuai	(Jumlah Rincian Total BMD yang Ada/ Data Aset pada Neraca Pemerintah Kota) X 100%	Bidang Aset Daerah	BPKAD
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Perangkat Daerah	Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Permenpan No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat	Sekretariat	BPKAD
		Maturitas SPIP Perangkat Daerah	Level	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 700/Kep. 240-Inspektorat/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kota Tasikmalaya	Hasil Evaluasi Maturitas SPIP dari Inspektorat	Sekretariat	BPKAD
		Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP	%	Laporan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Laporan keuangan daerah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Sekretariat	BPKAD

Tabel 7.4
IKU BPKAD Tahun 2021-2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN/ PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik yang efektif, efisien, dan transparan	Capaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	Permenpan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat	BPKAD

Tahun 2017-2022

2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang akuntabel	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori (Poin)	Permenpan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik	Hasil Penilaian SAKIP BPKAD oleh Inspektorat	Sekretariat	BPKAD
3.	Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas, transparan dan akuntabel	Opini BPK atas LKPD Kota Tasikmalaya	Opini	Opini BPK atas LKPD Kota Tasikmalaya	Opini dari BPK	Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset Daerah	BPKAD

Tahun 2017-2022

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra BPKAD Tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat menjabarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Dengan disusunnya Perubahan Renstra BPKAD Tahun 2017-2022 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Perubahan Renstra BPKAD Tahun 2017-2022, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan secara berkala.

Perubahan Renstra BPKAD Tahun 2017-2022 akan tercapai apabila terdapat komitmen dari seluruh komponen dilingkungan BPKAD untuk bersama mewujudkannya secara transparan, profesional dan bertanggung jawab serta menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen Perubahan Renstra BPKAD Tahun 2017-2022.

Demikian Perubahan Renstra BPKAD Tahun 2017-2022 dibuat, semoga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



HANAFLI, SH., MH
NIP. 19680705 199203 1 011